

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada Negara Indonesia maka kita tidak lah asing dengan istilah ekspor impor dalam kehidupan sehari-hari. Banyak barang yang ada di sekitar kita bias jadi adalah barang impor, karena memang tidak dapat dipungkiri kita sendiri memang membutuhkan barang-barang tersebut. Biasanya alasan pemerintah mengimpor suatu barang adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat, bukan berarti di Indonesia tidak ada, tetapi lebih ke kurangnya barang tersebut sehingga menjadikan pemerintah mengimpor suatu barang. Sedangkan hukum yang mengatur Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mencakup tentang ekspor impor, dalam undang-undang tersebut sudah diatur mulai dari tata cara ekspor, pengenaan pajak pada ekspor, dan lain-lain.

Banyak sekali contoh barang yang diimpor di Indonesia, tembakau adalah salah satu contohnya. Kita tidak dapat menganggap remeh barang seperti tembakau karena pada kenyataannya di Indonesia pajak terbesar adalah dari rokok itu sendiri. Dengan rokok pemerintah dapat untung bertriliyun rupiah walaupun pada dasarnya rokok itu tidak baik bagi kesehatan, tapi kenyataannya masih banyak saja penikmat rokok yang kurang mengutamakan hal tersebut.

Walaupun di Indonesia sendiri merupakan Negara yang kaya akan tembakaunya tapi produsen rokok masih ingin mengikuti keinginan konsumen, jadi tidak sedikit pula tembakau yang di datangkan dari luar negeri, dari itulah juga merupakan salah satu keuntungan bangsa, yaitu dari impor tembakau. Rata rata para produsen rokok hanya mengimpor daun tembakaunya jadi pengolahan tetap ada di Indonesia. Maka pada kali ini saya akan membahas penanggungan pajak impor tembakau.

Dalam proses lalu lintas masuk keluarnya tembakau dari atau ke kawasan berikat berawal dari masuknya barang yang berasal dari luar negeri melalui jalur laut yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan diangkut melalui jalur darat menggunakan kontainer menuju kawasan berikat, dan dalam proses ini peran pengawasan Bea Cukai sangat dibutuhkan. Setelah barang sampai dalam kawasan berikat maka barang tersebut diolah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Setelah barang selesai diolah maka nantinya akan keluar tujuan baru, maksudnya adalah seperti barang jadi akan dikirim kemana, sisa akan dikirim sendiri sendiri maka disini lah baru pemilah milahan pajak akan diberlakukan.

B. Perumusan Masalah

1. Alur dan proses penangguhan bea masuk tembakau pada Kawasan Berikat (KB) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Malang?
2. Permasalahan yang muncul dan cara mengatasi dalam proses penangguhan bea masuk tembakau pada Kawasan Berikat (KB) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Malang?

C. Batasan Masalah

1. Bagaimana proses penangguhan bea masuk tembakau pada Kawasan Berikat (KB) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Malang?
2. Bagaimana permasalahan yang muncul dan cara mengatasi dalam proses penangguhan bea masuk tembakau pada Kawasan Berikat (KB) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Malang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang telah ditetapkan untuk penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penangguhan bea masuk tembakau pada Kawasan Berikat (KB) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dan cara mengatasi dalam proses penangguhan bea masuk tembakau pada Kawasan Berikat (KB) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Malang

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
 - a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang guna untuk mengevaluasi peraturan yang sudah ada.
2. Bagi penulis atau peneliti selanjutnya
 - a. Sebagai media untuk menguji mahasiswa dalam membahas dan menganalisis berkaitan dengan Proses Penangguhan Bea Masuk Tembakau Pada Kawasan Berikat (KB) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Malang.
 - b. Dapat membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang.